

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Demokrasi berupa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan lima tahun sekali yang melibatkan Partai Politik dan Anggota Masyarakat Indonesia. Partai Politik adalah menjalani atau menyusun suatu ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya mengenai Menurut Miriam Budiardjo, partai Politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi. Nilai dan cita yang sesuai. Bisa juga dikatakan sekumpulan orang yang memiliki asas, pikiran dan tujuan yang sama di bidang Politik yang didasari partai Pemimpin atau struktur partai yang diatur oleh sekelompok anggota partai yang terpadang atau bisa saja ditempati partai massa, yaitu Partai Politik yang di dasari keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini adalah untuk memajukan Partai dan anggota di dalamnya.

Kampanye membutuhkan dana dalam pelaksanaannya dan dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Penyelenggaraan pemilu telah usai, namun evaluasi atas pendanaan menjadi satu sorotan penting mengingat tingginya korupsi yang terjadi. Di Indonesia sendiri besar dana kampanye mempengaruhi elektabilitas keberhasilan pasangan calon atau partai politik.

Dalam mencegah kecurangan itu terjadi maka diperlukan sebuah audit atau pemeriksaan, Menurut habibi (2019) Audit merupakan suatu kegiatan atau proses pengumpulan data, dan penilaian yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang memiliki sifat independensi untuk menilai laporan keuangan yang telah disusun apakah telah sesuai dengan kriteria dan bukti – bukti pendukung yang mendasarinya atau belum. Audit ada beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Dalam kampanye ini Audit Kepatuhan yaitu pemeriksaan yang tujuan – tujuannya untuk menentukan apa yang diaudit di perusahaan klien (Partai Politik) sesuai dengan standar prosedur – prosedur khusus atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Contohnya, PKB yang diberikan catatan empat ketidakpatuhan. Mulai temuan penerimaan sumbangan dana kampanye yang tak masuk rekening khusus hingga persoalan kelengkapan bukti pengeluaran caleg partai. Temuan ketidakpatuhan juga

terjadi di Partai Gerindra dan Nasdem. Sementara itu, laporan PDIP atau PKS dinyatakan memenuhi kepatuhan. Ketidakpatuhan juga ditemukan di partai baru. Contohnya, hasil audit terhadap LPPDK Partai Garuda. Kantor akuntan publik menemukan enam ketidakpatuhan dalam penyusunan laporan.

Terdapat Keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Motivasi saya sebagai penulis secara keseluruhan anggota Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) dikatakan Patuh. Tetapi, karena ada beberapa orang yang tidak melengkapi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) contohnya tidak memberikan atau menyerahkan bukti pendukung atau bukti fisik kepada KPU, sehingga saya tertarik untuk mengambil atau mengangkat judul ini karena kebetulan saya membantu mengaudit partai tersebut.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI PERSATUAN INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Kasus Hasil Audit KAP Panata Dan Rekan Pada Peserta Pemilihan Umum Partai Persatuan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laporan dana kampanye tahun 2019 Partai persatuan Indonesia provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana analisis kepatuhan laporan dana kampanye tahun 2019 partai Persatuan Indonesia provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai PKPU Nomor 24 tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah diteliti di atas, maka maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui laporan dana kampanye tahun 2019 partai Persatuan Indonesia.
2. Untuk mengetahui laporan dana kampanye sesuai PKPU Nomor 24 tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi partai

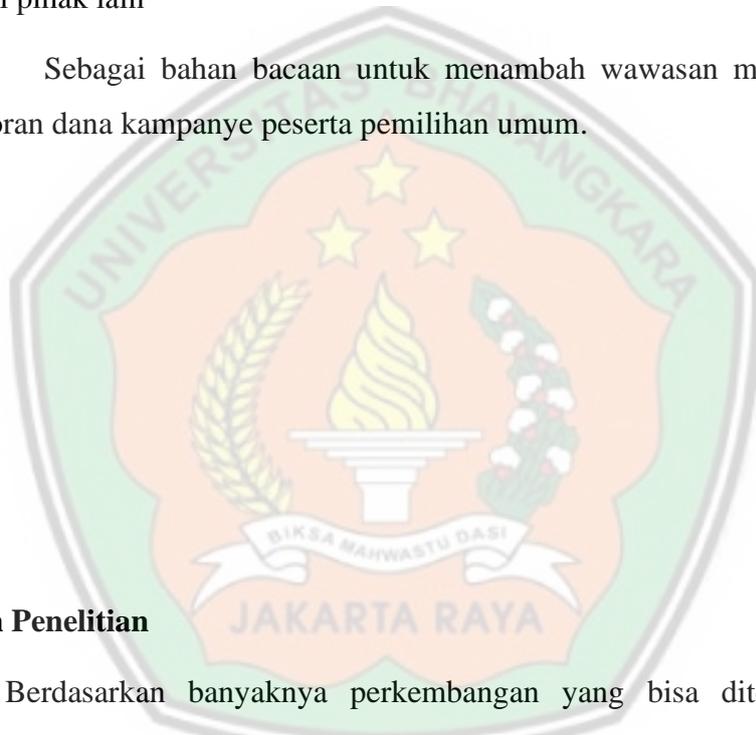
Sebagai bahan referensi untuk membuat suatu sistem untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dana kampanye calon legislatif.

2. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi penulisan karya tulis mengenai kepatuhan laporan dana kampanye.

3. Bagi pihak lain

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan mengenai kepatuhan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum.



1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan di dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan – batasan masalah yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun batasan – batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Periode audit laporan dana kampanye partai Persatuan Indonesia di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian tentang bagaimana dan untuk apa penelitian dilakukan sehingga berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas Mengenai Profil KAP, membahas mengenai profil Persatuan Indonesia, hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran.

